



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JL. BUKIT DUMAR NO.1 KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL 97611 TELEPON (0916) 21696 FAKSIMILE (0916) 21606
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tual@kkp.go.id

Nomor : B.2845/PSDKPLan.6/TU.210/X/2025 6 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik
dan Evaluasi Standar Pelayanan Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
di Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual periode Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimaksud sebagai bahan laporan dan dokumentasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP khususnya Tim Kerja Manajemen Transformasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait dengan penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Kapal Perikanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
EVALUASI STANDAR PELAYANAN

LINGKUP PANGKALAN PSDKP
TUAL TAHUN 2025

2025



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan



psdkp.tual



Pangkalan Psdkp Tual



PSDKP_Tual



panganbiru
Pangan Biru, Pangan Berkualitas

KATA PENGANTAR

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari kesejahteraan suatu negara (*welfare state*). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi Pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Atas pemikiran tersebut maka Pangkalan PSDKP Tual selaku penyelenggara pelayanan publik bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menyusun Standar Pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan Standar Pelayanan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual selaku Penyedia Layanan Publik (*Public Services Provider*).

Dalam pelaksanaan proses pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi terkait pelayanan publik yang diberikan, salah satunya dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat untuk menilai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Melalui kegiatan “Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025” ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik di Pangkalan PSDKP Tual dan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pangkalan PSDKP Tual dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. kepada Pemerintah Kabupaten/kota Tual khususnya seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual dimasa yang akan datang dan kami mohon kepada semua pihak agar dapat

memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil kegiatan ini, agar dapat memperbaiki tingkat kesalahan serta menjadi pedoman kepada semua pihak.

Tual, 6 Oktober 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
NIP. 19850316 200701 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
a. Maksud	2
b. Tujuan	2
c. Sasaran	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
2.1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	4
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	4
b. Tempat Pelaksanaan	4
2.2 PANITIA KEGIATAN.....	4
2.3 PESERTA.....	5
2.4 PEMBIAYAAN	5
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
3.1. METODE PELAKSANAAN	6
3.2. IDENTIFIKASI MASALAH	10
3.3. ANALISIS	11
3.3. RENCANA AKSI	11
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
4.1 KESIMPULAN	12
4.2 SARAN	12
DOKUMENTASI KEGIATAN	13
LAMPIRAN	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur negara saat ini diharapkan dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja pelayanan publik tersebut. Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut perlu dilaksanakan *public hearing*. *Public Hearing* merupakan sarana untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan agar terjadi persamaan persepsi antara masyarakat selaku pengguna layanan dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual selaku penyedia layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual menyelenggarakan 2 (dua) bentuk pelayanan, yaitu penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan. Kedua hal tersebut bersinggungan langsung terhadap pengguna layanan (masyarakat/pelaku usaha) di Lingkungan Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tual. Demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/pelaku usaha kami memandang penting dan wajib melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan PSDKP sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 guna perbaikan dan penguatan pelayanan yang telah kami berikan.

Sejalan dengan hal tersebut, demi meningkatkan efektifitas pelayanan publik, Pangkalan PSDKP Tual juga berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) sebagai salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sehingga untuk mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, mewujudkan pelayanan prima, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan terpercaya.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual adalah untuk :

1. Mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kualitas, kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan layanan yang diberikan Pangkalan PSDKP Tual.
2. Mengevaluasi kesesuaian standar pelayanan dengan kebutuhan pengguna layanan, agar standar yang ditetapkan benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan secara optimal.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Membangun komitmen perbaikan berkelanjutan, dengan menampung kritik, saran, serta usulan perbaikan dari masyarakat, nelayan, pelaku usaha perikanan, dan stakeholder lainnya.
5. Mewujudkan pelayanan yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan tetapi juga berperan dalam menyusun, mengawasi, dan menilai kualitas layanan.

Singkatnya, forum ini bertujuan agar standar pelayanan di Pangkalan PSDKP Tual lebih responsif, berkualitas, dan sesuai harapan masyarakat serta pengguna layanan.

c. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan, Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu:

- 1) Tersusunnya standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta pengguna layanan Pangkalan PSDKP Tual.
- 2) Terhimpunnya aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan (nelayan, pelaku usaha perikanan, mitra kerja, dan masyarakat).
- 3) Teridentifikasinya kendala dan kelemahan dalam implementasi pelayanan publik di Pangkalan PSDKP Tual.
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik.
- 5) Tercapainya kesepahaman dan komitmen antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam hal ini Pengguna layanan seperti pemilik kapal perikanan, nahkoda kapal perikanan, dan pemilik perusahaan bidang Perikanan yang berada di Wilayah Lingkungan Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual dalam menilai kinerja pelayanan publik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual.
- 7) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan dan Sosialisasi Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 dengan jadwal terlampir;

b. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual dilaksanakan di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Jl. Pelabuhan Perikanan, Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku (97662).

2.2 PANITIA KEGIATAN

Panitia kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual tahun 2025 ini merujuk kepada Hasil Rapat Pembentukan Kepanitiaan dan Penyusunan acara Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si NIP. 19850316 200701 1 006	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab
2	Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi NIP. 19920424 201503 1 001	Penata, III/c	Ketua
3	Fajar Surya Pratama, S.Pi, M.P NIP. 19900531 201503 1 001	Penata, III/c	Anggota
4	Ade Prakasa Putra, S.E NIP. 19890630 201503 1 003	Penata, III/c	Anggota

2.3 PESERTA

Peserta Kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual mengundang beberapa Pelaku usaha / pengguna jasa atau *Stakeholder*, perwakilan instansi terkait, perwakilan Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Tual, serta Pengawas Perikanan sebagaimana daftar terlampir;

2.4 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual dibebankan pada DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Nomor SP DIPA-032.05.2.440853/2025, tanggal 2 Desember 2024.

BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual diawali dengan Sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Bapak Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mengevaluasi Standar Pelayanan Publik pada Pangkalan PSDKP Tual sebagai wujud dan komitmen kita dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik secara prima guna mewujudkan wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Pangkalan PSDKP Tual yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama.

Selanjutnya dilaksanakan diskusi panel Sesi I dengan materi forum konsultasi publik dalam rangka evaluasi standar pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Narasumber Auditor Muda Inspektorat II Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Srianto, S.Pi, M.Ak dengan moderator Kepala Subbagian Umum - Pangkalan PSDKP Tual Bapak Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi. Dalam pemaparannya secara daring, Auditor Muda Inspektorat II KKP menjelaskan tentang Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan dalam Pelayanan Publik. Pemateri menjelaskan tentang Definisi Korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prinsip Anti Korupsi yang pertama adalah Integritas yaitu Menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi dalam bekerja. Transparansi yaitu Terbuka dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya. Akuntabilitas yaitu Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan dan keputusan. Profesionalisme yaitu Mengedepankan kompetensi, keadilan, dan kinerja. Bentuk Pencegahan Korupsi yaitu pertama Penerapan sistem pengendalian internal, kedua Penguatan budaya kerja berintegritas, ketiga Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan terakhir Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pemateri juga menjelaskan tentang Definisi Gratifikasi yaitu

pemberian dalam arti luas, mencakup uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 dan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Kemudian menjelaskan tentang Klasifikasi Gratifikasi yang terbagi menjadi dua. Pertama Dilarang (bersifat suap), Jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas, misalnya pemberian hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kedua Tidak dilarang, Jika merupakan bentuk umum dalam adat/kehidupan sosial, seperti pemberian hadiah pernikahan atau ulang tahun sepanjang tidak terkait jabatan. Selanjutnya menjelaskan tentang Pengendalian Gratifikasi yaitu pertama wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja. Kedua instansi wajib membangun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai sarana pelaporan internal sebelum diteruskan ke KPK. Ketiga melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Tual tentang gratifikasi.

Diskusi panel II adalah Peningkatan Budaya Pelayanan Prima yang dibawakan secara daring oleh Ibu Kumala Sulistyaningrum, S.Sos selaku staf dari Tim Kerja Manajemen Transformasi Sekretariat Ditjen PSDKP yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Tual Bapak Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi. Dalam pemaparannya Ibu Kumala menyampaikan materi tentang Peningkatan Budaya Pelayanan Prima. Dalam kesempatan yang pertama pemateri menjelaskan tentang definisi pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan dengan kualitas yang melebihi harapan pengguna layanan. Harapan pengguna layanan diantaranya memperoleh kejelasan informasi pelayanan, rasa aman dan nyaman, segera dapat dilayani dan dilayani oleh petugas yang profesional, dilayani dengan adil, dipahami keinginannya, dan mudah untuk menghubungi petugas. Selanjutnya menjelaskan bahwa dalam mengelola pelaksanaan pelayanan prima yaitu dengan mengenali pengguna layanan, menetapkan standar perilaku pelayanan prima, menempatkan petugas yang kompeten, pelatihan secara terus menerus, membentuk tim pengendali, perbaikan sistem pelayanan guna mendukung pelayanan prima, perbaikan/bangun fasilitas yang mendukung, cek dan ricek, budayakan pengguna

layanan, berdayakan pegawai, perbaikan layanan internal, monitoring dan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian pemateri melanjutkan materi tentang Pembangunan budaya pelayanan prima yaitu dengan cara menetapkan regulasi untuk membangun komitmen, menetapkan kode etik pelayanan prima, membuat pernyataan komitmen, mendeklarasikan komitmen, menetapkan target unit kerja, melakukan pelatihan, mewajibkan setiap pimpinan untuk melakukan pengawasan, membuat forum pelaporan berkala langsung kepada pimpinan tertinggi, memberikan penghargaan bagi pimpinan dan unit kerja yang berhasil serta menetapkan role model. Pada hakikatnya Evaluasi Standar Pelayanan memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat sekaligus menjadi tolok ukur bagi penyelenggara layanan. Topik Selanjutnya membahas tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang memiliki tujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam Implementasinya Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan minimal 1 kali setahun dengan melibatkan responden pengguna layanan secara langsung, namun kebijakan di kementerian kelautan dan perikanan khususnya Ditjen PSDKP bahwa Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 bulan sekali atau Triwulanan. Berbicara mengenai Inovasi Pelayanan Publik, pemateri juga menyampaikan pentingnya terobosan pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan. Bentuk gagasan tersebut diantaranya berupa digitalisasi layanan (aplikasi, sistem online), Penyederhanaan prosedur, Layanan terpadu dan mobile service. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya Pemateri menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi petugas pelayanan, pemberian penghargaan, sanksi dan kompensasi bagi pengguna layanan, serta mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat dan sarana prasarana terpadu yang mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan publik.

Diskusi panel III atau yang terakhir yaitu membahas topik tentang Standar Pelayanan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan yang dibawa oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Sumber Daya Perikanan Pangkalan PSDKP Tual. Dalam pemaparannya dijelaskan lebih rinci mengenai Persyaratan Pemeriksaan Dokumen

Kapal Perikanan, Persyaratan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Sistem-Mekanisme dan Prosedur, Dasar Hukum, Sarana-Prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi petugas pelayanan, Pengawasan Internal, Waktu dan Lokasi Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Visi - Misi dan terakhir Moto Pelayanan. Pada Pemeriksaan dokumen kapal perikanan maka administrasi menjadi hal yang wajib untuk dilengkapi para pemilik/pengurus kapal diantaranya memiliki Perizinan Berusaha (SIUP,SIPI/SIKPI), Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Persetujuan Berlayar, Berita acara alih muat untuk kapal pengangkut ikan, E-bkp kapal perikanan, E-Logbook, Daftar Awak Kapal (*Crew List*) dsb. Pada Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan beberapa hal yang menjadi pemeriksaan yaitu Nama Kapal, Bahan Kapal, Tanda Selar dan Tanda Pengenal, Merk dan Nomor seri mesin, Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan, Kesesuaian nomor ID Transmitter yang terpasang di kapal dengan SKAT, Keaktifan transmitter SPKP, Jenis Ikan hasil tangkapan, serta Nama panggilan (*Call sign*). Selanjutnya pada sistem, mekanisme dan prosedur, tahapan pertama pengguna layanan menyampaikan permohonan rencana pendaratan ikan dengan menggunakan aplikasi, tahapan kedua pada saat permohonan diterima oleh petugas pelayanan maka selanjutnya akan disampaikan kepada pengawas perikanan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Pada saat pengawas perikanan memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmitter SPKP maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil tangkapan ikan sebelum menerbitkan HPK Kedatangan. HPK Kedatangan akan terbit setelah melewati beberapa tahapan proses diatas dan memastikan bahwa tidak terdapat/ditemukan nya ketidaksesuaian dan indikasi pelanggaran.

Setelah dihasilkan kesepakatan antara pengguna layanan (pemilik kapal perikanan, nahkoda kapal perikanan, dan pemilik perusahaan bidang Perikanan yang berada di Wilayah Kerja PSDKP Dobo) dan Pangkalan PSDKP Tual sebagai penyedia layanan, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Standar Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan yang ditandatangani oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual selaku penyelenggara layanan, pengguna jasa yang

diwakili Bapak Andi Subrandi selaku perwakilan dari PT. Mahkota Maritim Makmur, Bapak Rocky Mantaiborbir dari LSM/Organisasi Masyarakat, Bapak Thontji Galanggoga dari Tokoh Masyarakat Ketua Dewan Adat Aru, Ibu Ester Melania Pasamba S.E, MSA. selaku Akademisi dari PSDKU Aru Universitas Pattimura di Dobo, Bapak Latief selaku Kontributor TvOne Aru dan disaksikan oleh Komandan TNI Angkatan Laut Aru, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Kepala Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Gugus Pulau IX Kepulauan Aru, Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Inspektorat II KKP, dan Staf dari Tim Kerja Manajemen Transformasi Setditjen PSDKP.

Sebelum akhir acara Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 ditutup, dilaksanakan penyerahan sertifikat penghargaan sebagai petugas pelayanan publik terbaik lingkup Pangkalan PSDKP Tual Periode Semester I Tahun 2025 kepada Bapak Relly Maxi Purmiasa, S.Pi selaku Koordinator Wilker PSDKP Dobo sekaligus Pengawas Perikanan Ahli Pertama, serta penyerahan sertifikat penghargaan sebagai Pengguna Jasa/layanan terbaik Periode Semester I Tahun 2025 di Wilayah Kerja PSDKP Dobo kepada Ibu Angela Ongara dari PT. Lautan Berlian Indah, Bapak Hermayo Ang, S.Kom. dari PT. Samudera Mandiri Selatan dan Bapak Adry Tunggal dari Pengguna Jasa Perorangan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual Bapak Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si dan Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Tual Bapak Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat sarana dan prasarana bidang pelayanan publik masih perlu ditambah atau dilengkapi;
- b. Terdapat evaluasi standar pelayanan yang perlu dipublikasikan.

3.3. ANALISIS

Dari identifikasi Masalah diatas dapat dianalisa terkait permasalahan Standar Pelayanan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, sebagai berikut :

- a. Terdapat sarana dan prasaran bidang pelayanan publik khususnya untuk pengelolaan pengaduan masyarakat dan/atau sarana pelayanan publik yang perlu ditambah atau dilengkapi;
- b. Terdapat Keterbukaan Informasi Publik terkait publikasi Standar Pelayanan yang perlu disempurnakan dengan melakukan publikasi Standar Pelayanan.

3.4. RENCANA AKSI

Guna menindak lanjuti beberapa permasalahan tersebut diatas akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut :

- a. Melengkapi sarana dan prasaran bidang pelayanan publik khususnya untuk pengelolaan pengaduan masyarakat dan/atau sarana pelayanan publik yang perlu ditambah atau dilengkapi;
- b. Melakukan publikasi terkait Standar Pelayanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025 di media sosial Pangkalan PSDKP Tual.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah dilakukan Evaluasi Standar Pelayanan UPT PSDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2025.
2. Pangkalan PSDKP Tual telah menyatakan kesiapannya dan berkomitmen untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik demi terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

4.2 SARAN

Saran yang dapat kami sampaikan adalah Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Pangkalan PSDKP Tual perlu dilakukan secara periodik demi meningkatkan kualitas pelayanan Pangkalan PSDKP Tual kepada masyarakat pengguna jasa. Selain itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan berbasis inovasi sistem informasi maka Pangkalan PSDKP Tual perlu mengembangkan inovasi yang sudah ada guna mempermudah dan mempercepat waktu pelayanan ditinjau dari segi efisiensi dan efektifitas dengan keterbatasan yang ada.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Menyanyikan Lagu Wajib Indonesia Raya



Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual PSDKP Tual



Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Subbagian Umum
Pangkalan PSDKP Tual PSDKP Tual

**LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP TUAL TAHUN 2025**



Foto Bersama



Penyampaian Materi oleh Narasumber



Sesi Diskusi dan Konsultasi Publik

**LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP TUAL TAHUN 2025**



Penandatanganan Berita Acara hasil Kesepakatan Evaluasi Standar Pelayanan



Penyerahan Penghargaan Kepada Petugas Pelayanan Terbaik
Dan Pengguna Jasa Terbaik lingkup Pangkalan PSDKP Tual

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

Jalan Bukit Dumar Nomor 1 Komplek PPN Tual – Kotamadya Tual 97651

Telepon (0916) 21606, Faksimile (0916) 21696

Website : www.djpsdkp.kkp.go.id Surel : psdkp.tual@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP TUAL

Nomor : **B.2775**/PSDKPPlan.6/TU.220/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal 29 September Tahun 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Standar Laik Operasional (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama sebagai berikut

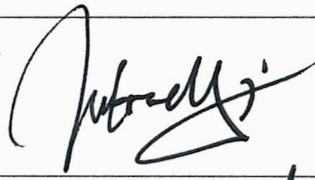
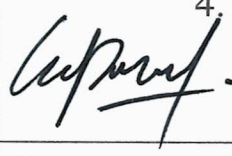
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Perbaikan
1.	Sarana Prasarana Bidang Pelayanan Publik masih perlu ditambah	Penambahan Sarana dan Prasarana Bidang Pelayanan Publik	Bulan Oktober – Desember Tahun 2025
2.	Evaluasi Standar Pelayanan (terlampir)	Ditetapkan dan dipublikasikan	Bulan Oktober Tahun 2025

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Dobo, 29 September 2025

NO.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	ANDI SIBRANDI 0853 4460 9577	Pengguna Layanan	1. 
2.	Rocky NANTAIBORBIK 08135549 3478	Organisasi Masyarakat/LSM	2. 
3.	Thontji Galanggoro 0852 4432 7356	Tokoh Masyarakat	3. 
4.	ESTER. M. PASAMBA 081 343 272 460	Akademisi	4. 
5.	0812 47193257 LATIF MODILIS	Media Massa	5. 



Kepala Pangkalan PSDKP Tual

E. H. S. Sostenes, S.St.Pi, M.Si)

Dibuat di Dobo

Koordinator Pelayanan Publik



Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

Jalan Bukit Dumar Nomor 1 Komplek PPN Tual – Kotamadya Tual 97651

Telepon (0916) 21606, Faksimile (0916) 21696

Website : www.djpsdkp.kkp.go.id Surel : psdkp.tual@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN HPK KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP TUAL

Nomor : **B.2776** /PSDKPLan.6/TU.220/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal 29 September Tahun 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama sebagai berikut

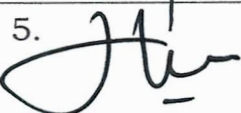
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Perbaikan
1.	Sarana Prasarana Bidang Pelayanan Publik masih perlu ditambah	Penambahan Sarana dan Prasarana Bidang Pelayanan Publik	Bulan Oktober – Desember Tahun 2025
2.	Evaluasi Standar Pelayanan (terlampir)	Ditetapkan dan dipublikasikan	Bulan Oktober Tahun 2025

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

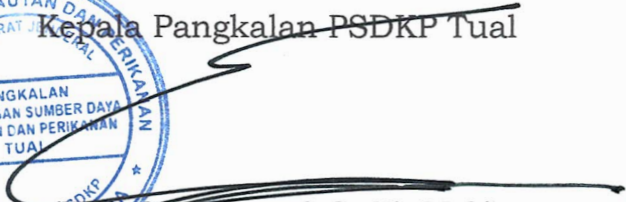
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Dobo, 29 September 2025

NO.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	ANDI SUBRANDI 085344609577	Pengguna Layanan	1. 
2.	Rocky MANTAIKOR 081355493478	Organisasi Masyarakat/LSM	2. 
3.	THONTJI GOLONGGPO 0852 9432 7356	Tokoh Masyarakat	3. 
4.	ESTER M. PASAMBA 081 343 272 460	Akademisi	4. 
5.	0812 4719 3257 Latif MADILUS	Media Massa	5. 



Kepala Pangkalan PSDKP Tual


Elik Sostenes, S.St.Pi, M.Si)

Dibuat di Dobo

Koordinator Pelayanan Publik



Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JL. BUKIT DUMAR NO 1, KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL 97611 TELEPON (0916) 21696, FAKSIMILE (0916) 21606
LAMAR www.kkp.go.id SUREL psdkp.tual@kkp.go.id

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari/Tangg : Senin, 29 September 2025

Agenda : Forum Konsultasi Publik dan Evaluasi Standar Pelayanan TH.2025

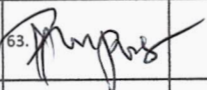
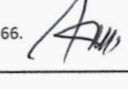
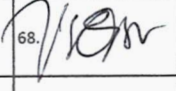
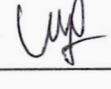
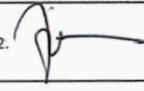
Jam : 08.00 WIT s/d Selesai

Tempat : Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo

NO	NAMA	INSTANSI/PERUSAHAAN	JAM KEHADIRAN	TTD
1	Riyan Maulana	PSDKP Tual	7.50	1.
2	Ithontji Galangogo	Ketua Dewan Adat/SAW.	7.53	2.
3	MORGAN	PENGURUS	7.55	3.
4	Mus / Anu . S	PT. MUM	7.57	4.
5	DEDI	PT - SPL	8.00	5.
6	Rocky MANTAI	AS. Nelayan ARU	08.00	6.
7	Yedi Sarag	Berkat Mulia	07.55	7.
8	Pieter Souisa	PPP DOBO	08.00	8.
9	IMANUEL SOUISA	PENGURUS	08.00	9.
10	TIMONIS DUMAR A	PSDKP Tual	7.59	10.
11	Yudanto .	Pengurus	08.00	11.
12	KIRTO	PT. SIMS	08.00	12.
13	YADI SUJARNO	LANAL ARU	08.00	13.
14	ESTER M PASAMBA	PSDKP ARU	08.30	14.
15	KARINA M.D. GOLAP	PSDKP ARU	08.30	15.
16	MELIANUS IAKOM	PPP TUAL	08.00	16.
17	Samsul Barry	PPP Dobo	08.40	17.

NO	NAMA	INSTANSI/PERUSAHAAN	JAM KEHADIRAN	TTD	
18	Hermano	PT Nali	08.50		18.
19	HARDHY	CV. LST	08.55	19.	
20	ANDI SUBRANDI	PT. MMM	08.55		20.
21	MUTIA	PT NIAGA INDONESIA	08.55	21.	
22	IKA F. DWI	PT. PSA	08.55		22. -
23	Wempi ubro	Pengurus	08.56	23.	
24	IRSAM	— u —	08.57		24.
25	ALWI	Pengurus	08.58	25.	
26	Tri yogo / Sukahel	Pengurus	08.59		26.
27	Sukman	Pengurus	08.56	27.	
28	ASENO KRISTOTIU	PENGURUS	09.00		28.
29	Sarwi	PENGURUS	09.01	29.	
30	RIONA	Pengurus	09.09		30.
31	Meike Tiver	ODGPX	08.50	31.	
32	MARICA (CV. ADM)	Pengurus	09.03		32.
33	Pak Harri S	PT-DARMA ARUMINA	09.07	33.	
34	CV BAHADI PRU PERMAH	PAK FERRY	09.07		34.
35	LATIF	Wartawan	09.07	35.	
36	HENDRY. LAWALATA	ENUMERATOR	09.08		36.
37	AN JUMAT	ENUMERATOR	09.09	37.	
38	Rauli	ENUMERATOR	09.10		38.
39	ERIC	Pengurus	08.11	39.	

NO	NAMA	INSTANSI/PERUSAHAAN	JAM KEHADIRAN	TTD	
40	Ade Praksana P.	PSDKP Tual	07.30		40. 
41	M. HASIR	PSDKP DORSO	07.31	41. 	
42	FRANSISKA	PSDKP DORSO	07-31		42. 
43	TANJUNG G. A	PSDKP DORSO	07-39	43. 	
44	F. DJAMONAY	PSDKP DORSO	07.39		44. 
45	VERONIKA DARAKAY	PSDKP DORSO	07-39	45. 	
46					46.
47				47.	
48					48.
49				49.	
50					50.
51				51.	
52					52.
53				53.	
54					54.
55				55.	
56					56.
57				57.	
58					58.
59				59.	
60					60.
61				61.	

NO	NAMA	INSTANSI/PERUSAHAAN	JAM KEHADIRAN	TTD
63	Relly M. Purnias	PSDKP DOBO	08.00	63. 
64	SAMUEL JAMCO	PSDKP DOBO	08.00	64. 
65	Snig Pilpala	PENGURUS	08.03	65. 
66	Adi XATA	PENGURUS	08.03	66. 
67	ONGEM RUSPANAHA	PENBURUS	08.04	67. 
68	HANS DJEROL DISKAN JOEL		08.00	68. 
69	Bani Setiawan	PT. Laut Timur Lom	08.03	69. 
70	Jozef. M. Sahilatu	SYAHBANDAR	08.15	70. 
71	LIPIA. ALVATIR	ENUM	08.00	71. 
72	A. Tualima	ENUM	08.20	72. 
73	RICHO	PENGURUS	08.20	73. 
74	CELO. K	PERS		74. 
75	KOKO. K	PERS		75. 
76				76.
77				77.
78				78.
79				79.
80				80.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JL. BUKIT DUMAR NO.1 KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL 97611 TELEPON (0916) 21696 FAKSIMILE (0916) 21606
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tual@kkp.go.id

Nomor	B.2737/PSDKPLan.6/TU.330/IX/2025	23 September 2025
Sifat	Biasa	
Lampiran	Dua berkas	
Hal	Undangan	

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Evaluasi Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Kapal Perikanan serta dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) lingkup Pangkalan PSDKP Tual maka kami bermaksud melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal	Senin / 29 September 2025
Lokasi	Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo Jl. Pelabuhan Perikanan, Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku 97662
Waktu	08.00 WIT – Selesai
Agenda	Terlampir

Terkait dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir atau menugaskan 1 (Satu) Pejabat/Staf untuk hadir pada acara dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (Hp +6281341497277).

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Erik Sostenes

Lampiran I

Nomor B.2737/PSDKPLan.6/TU.330/IX/2025

Tanggal 23 September 2025

DAFTAR TAMU UNDANGAN

1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kapolres Kabupaten Kepulauan Aru
3. Komandan TNI Angkatan Laut Aru
4. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus IX
5. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo
6. Bapak Thontji Galanggoga selaku Ketua Dewan Adat Aru
7. Koordinator Badan Karantina Nasional Wilker Dobo
8. Kepala PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru
9. Syahbandar di PPP. Dobo
10. Bpk. Agus Labetubun (Kontributor TVRI Maluku)
11. Bpk. Latief (Kontributor TV One)

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Erik Sostenes

Lampiran II

Nomor B.2737/PSDKPLan.6/TU.330/IX/2025

Tanggal 23 September 2025

**RUNDOWN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PANGKALAN PSDKP
TUAL – WILKER PSDKP DOBO TAHUN 2025 (Tentative)**

N	WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	
2.	08.30 – 08.45	Pembukaan	MC	Veronika Darakay
3.	08.45 – 09.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
4.	09.00 – 09.10	Pembacaan Do'a	Moh. Nasir	
5.	09.10 – 09.20	Laporan Ketua Panitia	Kepala Sub Bagian Umum PSDKP Tual	Riyan Maulana, S.Pi, M.Tr.Pi
6.	09.20 – 09.40	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Pangkalan PSDKP Tual	Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
7.	09.40 – 10.00	Foto Bersama	Panitia	
8.	10.00 – 11.00	Diskusi Panel 1. Pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelayanan publik 2. Penyelenggaraan Pelayanan Prima 3. Standar Pelayanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual	Inspektur II, Itjen KKP Setditjen PSDKP Kepala Pangkalan PSDKP Tual	Moderator Kepala Subbagian Umum
9.	11.00 – 11.30	Sesi Diskusi & Konsultasi Publik (Tanggapan, masukan, dan usulan peserta terkait pelayanan publik)		
10.	11.30 – 11.40	Penandatanganan BA Standar Pelayanan	Panitia	
11.	11.40 – 11.50	Pemberian Penghargaan Petugas Pelayanan Publik Terbaik Semester I Tahun 2025 Lingkup Pangkalan PSDKP Tual dan Pengguna layanan terbaik pada Wilker PSDKP Dobo	Panitia	
12.	11.50 – 12.00	Penutupan	Panitia	

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Erik Sostenes



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

Jalan Bukit Dumar No. 1
Komplek PPN Tual
Kotamadya Tual 97651

